

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi atau *economic growth* merupakan peningkatan total pendapatan secara keseluruhan atau peningkatan output selama periode tertentu. Dengan kata lain, terciptanya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa secara fisik dalam periode waktu tertentu. Masalah pertumbuhan ekonomi ini dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode selanjutnya. Maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, karena pencapaian pembangunan ekonomi dalam konteks daerah dan negara dapat dijelaskan dan sekaligus diukur dengan pertumbuhan ekonomi.²

Salah satu tolok ukur kemajuan sebuah negara adalah pertumbuhan ekonomi. Jika suatu negara memiliki perekonomian yang stabil dapat dikatakan bahwa negara tersebut maju. Sedangkan negara yang memiliki perekonomian terpuruk maka negara tersebut belum dikatakan sebagai negara maju.³ Sedangkan menurut Lincoln Arsyad, pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai peningkatan nilai Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto,

² Ika Musriana Siregar, "Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode Tahun 2013-2017," *Jurnal Ekonomi Pendidikan* Vol. 7, no. 2, hlm. 46

³ Peter Wilson N. Gregory Mankiw, Euston Quah, *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Asia Jilid 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 203

tanpa mempertimbangkan apakah pertumbuhan tersebut lebih tinggi atau lebih rendah daripada pertumbuhan jumlah penduduk, atau apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonomi atau tidak.⁴

Sedangkan pertumbuhan ekonomi regional adalah tambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, yaitu naiknya nilai tambah (*value added*) yang terjadi pada suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi regional dapat dilihat dari tingkat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator utama yang mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, semakin baik pula kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku atau harga konstan, di mana perhitungan berdasarkan harga berlaku menggunakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.

**Tabel 1. 1 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia
Tahun 2018-2023**

Tahun	Peringkat Teratas	Nilai (Milyar)	Peringkat Terbawah	Nilai (Milyar)
2018	DKI Jakarta	2.592.607	Maluku Utara	36.469
	Jawa Timur	2.188.766	Gorontalo	37.731
	Jawa Barat	1.960.628	Maluku	43.047
2019	DKI Jakarta	2.815.636	Maluku Utara	39.695
	Jawa Timur	2.345.549	Gorontalo	41.145
	Jawa Barat	2.123.154	Maluku	46.153
2020	DKI Jakarta	2.767.273	Gorontalo	41.730

⁴ Arsyad Lincolin, *Ekonomi Pembangunan: Edisi Keempat* (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), hlm. 13

Tahun	Peringkat Teratas	Nilai (Milyar)	Peringkat Terbawah	Nilai (Milyar)
	Jawa Timur	2.299.808	Maluku Utara	42.299
	Jawa Barat	2.082.107	Maluku	46.263
2021	DKI Jakarta	2.912.885	Gorontalo	43.893
	Jawa Timur	2.454.792	Maluku	48.894
	Jawa Barat	2.204.660	Sulawesi Barat	50.566
2022	DKI Jakarta	3.188.541	Gorontalo	47.566
	Jawa Timur	2.731.424	Sulawesi Barat	54.028
	Jawa Barat	2.422.782	Maluku	54.079
2023	DKI Jakarta	3.443.026	Gorontalo	51.367
	Jawa Timur	2.953.547	Maluku	58.488
	Jawa Barat	2.625.226	Sulawesi Barat	58.572

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (data diolah)⁵

Meskipun PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, ketimpangan antar daerah sering kali menjadi masalah serius. Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketimpangan dalam distribusi pendapatan daerah yang tidak merata, konsentrasi investasi, dan infrastruktur yang tidak merata sehingga akan terus meningkatkan angka kemiskinan.⁶ Terbukti dari tabel 1.1, provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat secara konsisten menjadi tiga provinsi dengan PDRB tertinggi di Indonesia selama periode 2018-2023, mencerminkan dominasi ekonomi terpusat di Pulau Jawa yang didukung oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa. Sementara itu, provinsi seperti Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, dan Sulawesi Barat sering

⁵ Badan Pusat Statistik, "Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (Miliar Rupiah), 2023", <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WkdVMWRYVnBkMnBvVEhKSVkyWXhNblZtTjJSbmR6MDkjMw==/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-provinsi--miliar-rupiah---2022.html?year=2023>, diakses 20 Maret 2025.

⁶ Ghaly Rizquillah Ahrizal, "Analisis PDRB 34 Provinsi Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo," *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 6, no. 3 (2022): 396–408, hlm. 397

berada di posisi terendah di enam tahun terakhir, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola potensi dan sumber daya lokal guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kerangka teori pertumbuhan endogen, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi justru dipengaruhi oleh faktor internal dalam perekonomian itu sendiri, seperti pendapatan daerah, belanja modal, investasi dan kemiskinan. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah terutama pada sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi.⁷

Selain itu, melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk merancang kebijakan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempercepat proses pembangunan ekonomi regional. Dengan demikian, intervensi fiskal daerah yang tepat sasaran dapat menghasilkan efek jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme internal yang berkelanjutan.⁸

Kebijakan desentralisasi fiskal sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

⁷ Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Economic Development Twelfth Edition* (12th Ed.) Pearson, 2012, hlm. 78

⁸ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, “Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Satu Dekade Setelah Ledakan Besar,” *Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Satu Dekade Setelah Ledakan Besar*, 2011, hlm. 110

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran yang diperlukan dalam menyediakan pelayanan publik.⁹ Pemerintah daerah dapat diberi kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah daerah.¹⁰

**Tabel 1. 2 Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Antar Daerah di Indonesia
Tahun 2018-2023**

Tahun	Peringkat Teratas	Nilai (Milyar)	Peringkat Terbawah	Nilai (Milyar)
2018	DKI Jakarta	43,327	Sulawesi Barat	718,91
	Jawa Barat	40,240	Gorontalo	926,67
	Jawa Timur	37,086	Papua Barat	937,41
2019	DKI Jakarta	45,707	Sulawesi Barat	0,773
	Jawa Barat	44,150	Maluku Utara	0,990
	Jawa Timur	39,344	Maluku	1,045
2020	DKI Jakarta	37,414	Sulawesi Barat	0,807
	Jawa Timur	37,042	Gorontalo	0,983
	Jawa Barat	39,915	Maluku Utara	1,004
2021	Jawa Barat	45,351	Sulawesi Barat	1,098
	DKI Jakarta	41,606	Papua Barat	1,098
	Jawa Tengah	31,611	Maluku	1,107
2022	Jawa Barat	49,218	Sulawesi Barat	0,847
	DKI Jakarta	45,608	Gorontalo	1,083

⁹ JDIH BPK, “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>, diakses 24 Maret 2025

¹⁰ Agus Sunarya Sulaeman and Vivin Silvia, “Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia,” *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 4, no. 1 (2019): 97–112, hlm. 89

Tahun	Peringkat Teratas	Nilai (Milyar)	Peringkat Terbawah	Nilai (Milyar)
	Jawa Timur	43,479	Papua Barat	1,121
2023	Jawa Barat	49,602	Papua Barat	0,628
	DKI Jakarta	48,860	Sulawesi Barat	0,900
	Jawa Timur	46,107	Maluku	1,254

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2023 (data diolah)¹¹

Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar daerah mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan PAD tinggi memiliki kebebasan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program strategis untuk mendorong aktivitas ekonomi. Sebaliknya, daerah dengan PAD rendah cenderung menghadapi keterbatasan dalam menggerakkan potensi ekonomi. Dalam kasusnya di Indonesia dapat di lihat dari tabel 1.2, dimana ketimpangan PAD antar provinsi terlihat sangat mencolok. Ketimpangan besar ini mengindikasikan adanya kesenjangan kemampuan pembiayaan pembangunan antar daerah.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik dan tepat akan menunjang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja modal. Belanja modal mencakup pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana semakin besar alokasi belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka semakin

¹¹ DJPK Kemenkeu, "POSTUR APBD," <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2022&provinsi=22&pemda=->, diakses 11 April 2025

tinggi pula pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Hal ini juga sejalan dengan teori Keynesian yang menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan permintaan agregat.

Tabel 1. 3 Nilai Belanja Modal Antar Daerah di Indonesia Tahun 2018-2023

Tahun	Peringkat Teratas	Nilai (Milyar)	Peringkat Terbawah	Nilai (Milyar)
2018	Kalimantar Barat	18,572	Gorontalo	1,325
	Jawa Barat	17,845	Sulawesi Barat	1,666
	Jawa Timur	18,572	Maluku Utara	2,583
2019	Jawa Timur	21.119	Gorontalo	1,338
	Jawa Barat	19.634	Kalimantan Utara	1,538
	Jawa Tengah	15.513	Kep. Bangka Belitung	1,821
2020	Jawa Timur	14.474	Gorontalo	1,054
	Jawa Barat	14,07	Kep. Bangka Belitung	1,382
	Jawa Tengah	9,914	Sulawesi Barat	1,420
2021	Jawa Barat	15,530	D.I. Yogyakarta	0,654
	Jawa Timur	14,922	Kalimantan Utara	1,240
	Jawa Tengah	11,376	Gorontalo	1,200
2022	Jawa Timur	18,544	Kalimantan Utara	1,494
	Jawa Barat	15,568	Gorontalo	1,497
	Jawa Tengah	13,215	Sulawesi Barat	1,499
2023	Kalimantan Timur	15,784	Papua	1,934
	Jawa Timur	17,893	Gorontalo	1,108
	Jawa Barat	15,354	Sulawesi Barat	1,420

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2023 (data diolah)¹²

Dari tabel 1.3 semakin menegaskan adanya ketimpangan antar wilayah yang signifikan di Indonesia. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa secara konsisten menempati peringkat tiga teratas dalam alokasi belanja modal. Sebaliknya,

¹² Kemenkeu....., diakses 11 April 2025

provinsi seperti Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat berada di posisi terbawah dengan alokasi yang sangat kecil. Ketimpangan ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan fiskal yang berpotensi memengaruhi kemampuan daerah dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan belanja modal yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk menarik investasi, sementara daerah dengan belanja modal rendah berisiko tertinggal dalam pembangunan.

Ketimpangan belanja modal juga mempengaruhi adanya investasi pihak swasta. Daerah yang memiliki belanja modal tinggi umumnya mampu menyediakan infrastruktur dasar yang lebih baik, yang menjadi faktor penting dalam keputusan investasi. Sebaliknya, daerah dengan belanja modal yang rendah menghadapi keterbatasan dalam menyediakan prasarana yang memadai, sehingga cenderung kurang menarik bagi investor swasta. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, karena investasi swasta yang merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi lebih terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang telah maju.

Tabel 1. 4 Nilai Investasi Swasta Antar Daerah di Indonesia Tahun 2018-2023

Tahun	Peringkat Teratas	Nilai (Milyar)	Peringkat Terbawah	Nilai (Milyar)
2018	DKI Jakarta	49,174	Papua Barat	55,47
	Jawa Barat	42,367	Papua	122,65
	Jawa Timur	33,354	Maluku Utara	122,65
2019	DKI Jakarta	62,160	Maluku	0,283
	Jawa Barat	49,377	Papua Barat	0,380
	Jawa Timur	45,466	Papua	0,582
2020	Jawa Timur	55,685	Sulawesi Barat	0,253

Tahun	Peringkat Teratas	Nilai (Milyar)	Peringkat Terbawah	Nilai (Milyar)
	Jawa Barat	51,476	Maluku	0,477
	DKI Jakarta	43,012	Gorontalo	0,684
2021	Jawa Barat	60,031	Sulawesi Barat	0,395
	DKI Jakarta	54,761	Papua Barat	0,636
	Jawa Timur	52,581	Papua	0,936
2022	DKI Jakarta	89,283	Maluku	0,612
	Jawa Barat	80,912	Gorontalo	1,115
	Jawa Timur	65,405	Sulawesi Barat	1,313
2023	DKI Jakarta	95,279	Papua	1,174
	Jawa Barat	88,144	Papua Barat	1,262
	Jawa Timur	75,012	Maluku	1,906

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (data diolah)¹³

Investasi swasta yang diperoleh dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memberikan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Dengan meningkatnya investasi, kapasitas produksi dan lapangan kerja juga akan mengalami peningkatan. Namun, distribusi investasi yang tidak merata di setiap daerah menyebabkan minimnya aktivitas ekonomi yang terjadi. Ketimpangan dalam persebaran investasi berdampak pada kesenjangan kesempatan kerja dan pendapatan antar daerah.

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa provinsi dengan tingkat investasi tertinggi secara konsisten didominasi oleh daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, dimana daerah tersebut merupakan kota-kota terbesar di pulau

¹³ Badan Pusat Statistik, “Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Lokasi-Jumlah Investasi (Milyar Rupiah), 2021-2023,” <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzkzIzI=/realisasi-investasi-penanaman-modal-dalam-negeri-menurut-provinsi--investasi-.html>, diakses 11 April 2025

Jawa. Sebaliknya, provinsi seperti Papua, Papua Barat, dan Maluku tercatat sebagai daerah dengan nilai investasi terendah selama periode yang sama. Daerah dengan tingkat investasi tinggi dengan infrastruktur yang sangat memadai akan menciptakan pertumbuhan lapangan kerja yang lebih cepat, sementara daerah dengan investasi rendah mengalami keterbatasan kesempatan kerja. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup pembangunan infrastruktur yang merata, serta dipermudahnya regulasi untuk meningkatkan daya saing di daerah tertinggal.¹⁴

Di sisi lain, kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi karena dampaknya yang luas terhadap berbagai aspek pembangunan. Tingginya tingkat kemiskinan membatasi daya beli masyarakat, sehingga mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa yang pada akhirnya akan melemahkan aktivitas ekonomi. Dapat dilihat jelas pada tabel berikut:

Tabel 1. 5 Jumlah Kemiskinan Antar Daerah di Indonesia Tahun 2018-2023

Tahun	Peringkat Teratas	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Peringkat Terbawah	Jumlah (Ribuan Jiwa)
2018	Jawa Timur	4,292	Kalimantan Utara	49,59
	Jawa Tengah	3,867	Kep. Bangka Belitung	69,93
	Aceh	3,536	Maluku Utara	81,93
2019	Jawa Timur	4.056	Kalimantan Utara	48
	Jawa Tengah	3.679	Kep. Bangka Belitung	67
	Jawa Barat	3.375	Maluku Utara	87
2020	Jawa Timur	4.585	Kalimantan Utara	52

¹⁴ Siti Munawaroh, "Pengaruh Investasi Swasta (Pmdn), Belanja Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung," *Business and Entrepreneurship Journal (BEJ)* 4, no. 2 (2023): 41–45, hlm. 42

Tahun	Peringkat Teratas	Jumlah (Ribu Jiwa)	Peringkat Terbawah	Jumlah (Ribu Jiwa)
	Jawa Tengah	4.119	Kep. Bangka Belitung	72
	Jawa Barat	4.188	Maluku Utara	87
2021	Jawa Timur	4.259	Kalimantan Utara	49
	Jawa Tengah	3.934	Maluku Utara	81
	Jawa Barat	4.004	Kep. Bangka Belitung	69
2022	Jawa Timur	4.236	Kalimantan Utara	50
	Jawa Barat	4.053	Kep. Bangka Belitung	69
	Jawa Tengah	3.858	Maluku Utara	82
2023	Jawa Timur	4.188	Kalimantan Utara	47
	Jawa Barat	3.888	Kep. Bangka Belitung	68
	Jawa Tengah	3.791	Maluku Utara	83

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (data diolah)¹⁵

Tabel diatas menunjukkan bahwa pulau Jawa dengan penduduk terbanyak juga menyumbang tingkat kemiskinan yang tinggi juga, dengan angka mencapai lebih dari 3 hingga 4 juta jiwa per tahun. Di sisi lain, provinsi seperti Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku Utara secara konsisten menempati peringkat terbawah dalam jumlah penduduk miskin, yaitu kurang dari 100 ribu jiwa. Meskipun angka tersebut relatif kecil dibandingkan provinsi lain, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi kemiskinan yang diduga berasal dari ketidakmeratanya pembangunan serta perbedaan akses terhadap layanan publik antar wilayah. Ketika penduduk miskin tidak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, maka kualitas sumber daya manusia akan rendah dan pertumbuhan ekonomi sulit untuk bergerak maju.

¹⁵ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi Dan Daerah, 2024,” <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg1IzI=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>, diakses 11 April 2025

Pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan fondasi kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, ketimpangan PDRB antarprovinsi di Indonesia mengindikasikan adanya ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, investasi swasta, dan kemiskinan secara bersama-sama memengaruhi pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi Indonesia selama periode 2019-2023. Dimana semua variabel tersebut tidak berdiri sendiri dan memiliki keterkaitan yang erat. Peningkatan PAD dapat memperbesar belanja modal, belanja modal yang efektif dapat menarik investasi, dan investasi yang optimal dapat menurunkan tingkat kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, mengkaji keempat variabel ini secara simultan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

Penelitian ini memperbarui penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji hubungan antara dua atau tiga variabel saja, seperti penelitian oleh Fatmawati, M. Fahmi Zulvan dan Peppy Purbasari¹⁶ yang mengkaji tiga variabel saja. Maka Penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menguji pengaruh PAD, belanja modal, investasi, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi regional secara bersamaan. Selain

¹⁶ M Fahmi Zulvan and Heppy Purbasari, "Pengaruh Investasi, Belanja Modal, Dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal EMT KITA* 8, no. 1 (2024): 175–86.

itu, juga menggunakan data terbaru hingga tahun 2023, yang mencakup kondisi sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19, serta menerapkan metode analisis regresi data panel dengan Model *Fixed Effect* (FEM). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang kuat mengenai peran PAD, belanja modal, investasi swasta, dan kemiskinan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, investasi swasta, dan kemiskinan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional indonesia?
3. Apakah belanja modal berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional indonesia?

4. Apakah investasi swasta berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional indonesia?
5. Apakah kemiskinan berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh simultan PAD, belanja modal, investasi swasta, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh signifikan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh signifikan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh signifikan tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu, wawasan dan pengetahuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh PAD dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna sebagai acuan ataupun masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi sehingga dapat ditemukan sebuah solusi yang efektif dan berguna di masa yang akan datang.

b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini dapat menambah kepustakaan UIN Sayyid Ali Rahmtullah Tulungagung untuk dijadikan referensi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademis.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan ide-ide penelitian baru, dan penelitian ini dijadikan acuan atau *referensi* terkait dengan pembaruan penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Adanya ruang lingkup dan keterbatasan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa luas cakupan pembahasan dan menghindari tidak terkendalinya baasan masalah yang berlebihan dalam penelitian ini.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisa terkait pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Variabel X sebagai variabel bebas (*independent*) terdiri dari X1

(PAD), X2 (Belanja Modal), X3 (Investasi Swasta), X4 (Kemiskinan) dan variabel Y sebagai variabel terikat (*dependent*) yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya dibatasi pada variabel Pendapata Asli Daerah (PAD), belanja modal, investasi swasta, kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian ini juga melakukan pembatasan periode waktu yang ditetapkan yaitu hanya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

F. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. PAD berfungsi sebagai indikator kemandirian fiskal daerah dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.¹⁷

b. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk investasi dalam aset tetap, seperti pembangunan infrastruktur, pembelian peralatan, dan pengembangan fasilitas publik.

¹⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 17

Belanja modal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁸

c. Investasi Swasta

Investasi swasta adalah alokasi sumber daya oleh individu atau perusahaan swasta untuk menciptakan atau memperluas kapasitas produksi, yang dapat berupa pembelian aset tetap, pengembangan teknologi, atau peningkatan infrastruktur. Investasi swasta berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.¹⁹

d. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat bersifat absolut maupun relatif, dan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi.²⁰

e. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi suatu negara atau daerah dari waktu ke waktu, yang biasanya diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi

¹⁸ Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: BPFE, 2017), hlm. 225

¹⁹ A. S. Salim, "Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2019): 45–60, hlm. 51

²⁰ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan Di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, diakses 25 Maret 2025

mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan.²¹

2. Definisi Operasional

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dioperasionalkan sebagai total pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang sah, termasuk pajak daerah seperti pajak kendaraan, pajak hotel, dan pajak restoran. Selain itu, PAD mencakup retribusi dari layanan publik, hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti sewa tanah dan bangunan, serta pendapatan lain yang sah seperti denda dan sanksi administratif. Data PAD diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah dan dokumen anggaran yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak selama periode 2018-2023, diukur dalam miliar untuk menganalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

b. Belanja Modal

Belanja Modal dioperasionalkan sebagai total pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk investasi dalam aset tetap, seperti pembangunan infrastruktur, pembelian peralatan, dan pengembangan fasilitas publik. Belanja modal mencakup semua jenis pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Data mengenai

²¹ Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Economic Development Twelfth Edition (12th Ed.)* (Pearson, 2012), hlm. 257

belanja modal diambil dari dokumen anggaran yang dipublikasikan oleh Dirjen Pajak selama periode 2018-2023, diukur dalam satuan nilai uang milyar untuk menganalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

c. Investasi Swasta

Investasi Swasta dioperasionalkan sebagai total nilai investasi yang dialokasikan oleh individu atau perusahaan swasta untuk menciptakan atau memperluas kapasitas produksi di daerah. Ini mencakup pengeluaran untuk pembelian aset tetap, pengembangan teknologi, dan peningkatan infrastruktur yang dilakukan oleh sektor swasta. Data mengenai investasi swasta diperoleh dari data Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2018-2023, diukur dalam satuan nilai uang (miliar) untuk menganalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

d. Kemiskinan

Kemiskinan dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Garis kemiskinan mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Data mengenai kemiskinan diambil dari laporan tahunan BPS yang mencakup informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat selama periode 2018-2023. Pengukuran kemiskinan ini

bertujuan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

e. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil suatu daerah selama periode 2018-2023. PDRB riil mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah, disesuaikan dengan inflasi untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi. Data mengenai PDRB diperoleh dari laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen resmi pemerintah daerah, yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel lain, seperti PAD, belanja modal, investasi swasta, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara isi dari sisi skripsi, yaitu suatu gambaran analisis skripsi secara keseluruhan dan dari sistematika itulah dapat dijadikan suatu arahan bagi pembaca untuk menelaah secara urutan terdapat tiga bagian dalam sistematika penulisan skripsi yaitu:

- 1. Bagian awal**, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.
- 2. Bagian utama**, merupakan bagian inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional, sistematika skripsi.
- BAB II** Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian.
- BAB III** Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang tahapan dalam proses pelaksanaan penelitian yaitu penentuan pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data yang digunakan peneliti. Tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan secara terperinci pada bab tiga.
- BAB IV** Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan tentang hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti terhadap variabel-variabel penelitian serta dilakukannya pengujian hipotesis.
- BAB V** Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang pembahasan mengenai permasalahan yang sedang diteliti guna menjawab rumusan masalah.
- BAB VI** Penutup, bab ini menjelaskan tentang rangkuman permasalahan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian menarik kesimpulan dari pertanyaan

rumusan masalah. Pada poin berikutnya peneliti dapat mengemukakan saran dari hasil penelitian.

3. **Bagian akhir**, terdiri dari daftar pustaka, lampiran lampiran yang terdiri dari data penelitian, hasil penelitian, kartu kendali bimbingan, dan daftar riwayat hidup.